

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian. Sektor ini memiliki peranan strategis dalam menopang ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi serta memberdayakan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Peran sektor pertanian meliputi penyediaan pangan, penyediaan bahan baku industri, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat yang berdampak langsung pada pembangunan nasional. Kondisi geografis Indonesia yang terletak di wilayah khatulistiwa dengan iklim tropis mendukung tingginya keanekaragaman hayati. Dukungan tersebut diperkuat oleh curah hujan yang relatif tinggi, intensitas sinar matahari sepanjang tahun serta ketersediaan sumber daya air yang memadai. Kombinasi faktor tersebut menciptakan kondisi yang optimal bagi pertumbuhan berbagai komoditas pertanian dan keberlanjutan ekosistem di Indonesia (Oktsyavitto dkk, 2025).

Lahan sawah memiliki peranan penting dalam menjaga ketersediaan beras nasional, namun luasannya terus mengalami penurunan seiring meningkatnya jumlah penduduk. Data CIA World Factbook (2025) mencatat bahwa Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, dengan populasi lebih dari 287 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk tersebut memberikan tekanan besar terhadap ketersediaan lahan sawah. Pengurangan luas lahan tidak hanya disebabkan oleh kebutuhan pemukiman, tetapi juga oleh alih fungsi lahan untuk kegiatan industri, perkebunan skala besar serta pembangunan berbagai fasilitas penunjang kawasan permukiman.

Alih fungsi lahan sawah di kawasan urban dan peri-urban mencerminkan dinamika pembangunan wilayah sekaligus menimbulkan konsekuensi serius terhadap ketahanan pangan. Konversi lahan sawah di Jabodetabek berlangsung masif akibat ekspansi permukiman dan pembangunan infrastruktur. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya tarik-menarik antara kebutuhan ruang untuk aktivitas non-pertanian dengan urgensi mempertahankan fungsi lahan produktif. Dampak yang muncul berupa penurunan kapasitas produksi pangan lokal sehingga wilayah semakin bergantung pada pasokan dari daerah lain. Ketergantungan semacam ini menimbulkan kerentanan, terutama ketika terjadi gangguan distribusi atau fluktuasi harga pangan. Keseluruhan kondisi tersebut menunjukkan bahwa alih fungsi lahan sawah bukan sekadar isu spasial, melainkan problem strategis yang menuntut kebijakan pengendalian konversi lahan secara lebih ketat dan berkelanjutan (Suroso & Firman, 2020)

Aktivitas perkotaan yang terus berkembang sering kali tidak seimbang dengan ketersediaan lahan pedesaan yang terbatas. Ketidakseimbangan tersebut memicu persaingan antar penggunaan lahan, khususnya antara sektor pertanian dan non-pertanian. Tekanan ini mendorong perubahan fungsi lahan sawah menjadi lahan dengan intensitas penggunaan yang lebih tinggi. Perkembangan wilayah perkotaan juga menyebabkan munculnya kawasan pinggiran kota atau fringe melalui proses pemekaran fisik kota yang dikenal sebagai urban sprawl. Perubahan penggunaan lahan mencerminkan peralihan fungsi sebagian atau seluruh kawasan tanah dari peruntukan awal ke peruntukan lain, yang sering kali berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan. Dorongan perubahan tersebut berkaitan erat

dengan kebutuhan penduduk yang terus meningkat serta tuntutan terhadap kualitas hidup yang lebih baik (Sarastika dkk, 2024).

Perubahan jenis lahan merupakan proses bertambahnya penggunaan lahan pada satu sektor yang diikuti dengan berkurangnya lahan pada sektor lainnya. Alih fungsi lahan didefinisikan sebagai perubahan penggunaan lahan dalam jangka waktu tertentu, misalnya dari lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Kebutuhan pembangunan berupa permukiman, industri dan infrastruktur yang terus meningkat menjadi faktor utama terjadinya konversi lahan. Dampak dari alih fungsi lahan tersebut berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan produktivitas tanah, sehingga diperlukan pengelolaan yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan (Pratama, 2023).

Perubahan penggunaan lahan merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam proses pembangunan. Dinamika tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan penyediaan ruang untuk penduduk yang terus bertambah, termasuk perumahan, infrastruktur dan fasilitas umum. Dorongan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat turut mempercepat pembangunan sarana dan prasarana yang lebih layak dan nyaman. Keterkaitan antara kedua faktor tersebut menjadi penyebab utama terjadinya perubahan penggunaan lahan yang cukup signifikan di berbagai wilayah (Mubarok dkk, 2022).

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi sektor pertanian yang luas serta sumber daya alam yang melimpah. Ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian menjadikan ketersediaan beras sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan wilayah sering diukur dari tingkat pertumbuhan dan kemajuan daerah, sedangkan proses pembangunan

tersebut memerlukan ketersediaan lahan dalam jumlah besar. Kebutuhan lahan untuk pembangunan bersaing dengan kebutuhan lahan produktif pertanian dalam upaya mencapai swasembada pangan. Laju pembangunan yang pesat di kawasan perkotaan seperti Kota Makassar berpotensi mengancam keberadaan lahan produktif akibat perubahan fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, bangunan komersial dan infrastruktur lainnya (Hairuddin dkk, 2024).

Kabupaten Maros yang terletak di pesisir barat Sulawesi Selatan sedang mengalami perkembangan pesat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional. Sektor bisnis, industri, perkantoran dan pemukiman berkembang dengan cepat sehingga daerah ini menjadi pusat pembangunan yang dinamis. Tantangan besar muncul terhadap keberlanjutan sektor pertanian, terutama lahan sawah produktif. Tekanan pembangunan menjadikan lahan pertanian sebagai sasaran alih fungsi, baik secara legal maupun tidak resmi. Data tahun 2016 menunjukkan luas lahan sawah di Kabupaten Maros mencapai 56.003,00 hektare yang mencerminkan potensi besar dalam mendukung produksi pangan lokal, khususnya beras sebagai komoditas utama. Alih fungsi lahan akibat perluasan kawasan bisnis dan pemukiman berisiko mengurangi jumlah lahan produktif secara signifikan. Kondisi tersebut dapat mengganggu sistem produksi padi, menurunkan hasil panen dan pada akhirnya mengancam ketersediaan beras di daerah tersebut.

Tabel 1. Luas Lahan, Produksi Padi dan Produktivitas di Kabupaten Maros (2016-2025).

Tahun	Luas Lahan Sawah (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2016	56.003,00	305.792,00	5,46
2017	53.514,60	285.214,04	5,33
2018	48.000,35	222.528,31	4,64
2019	43.633,05	205.038,16	4,70
2020	44.215,37	195.176,31	4,41
2021	40.228,86	206.262,13	5,13
2022	40.325,53	196.087,49	4,86
2023	37.779,27	182.044,08	4,82
2024	40.354,73	193.846,58	4,80
2025	39.489,00	186.929,00	4,73
Total	443.543,76	2.178.918,10	48,88
Rata-rata	44.354,38	217.891,81	4,89

Sumber: BPS dan Dinas Pertanian, Kab Maros & Sulawesi Selatan, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, mengenai luas lahan, produksi padi dan produktivitas di Kabupaten Maros periode 2016-2025, terlihat adanya tren penurunan luas lahan sawah yang signifikan akibat alih fungsi lahan. Pada tahun 2016, luas lahan tercatat sebesar 56.003,00 Ha, namun angka ini terus menyusut hingga diproyeksikan menjadi 39.489,00 Ha pada tahun 2025, dengan rata-rata luas lahan tahunan sebesar 44.354,38 Ha.

Sejalan dengan berkurangnya ketersediaan lahan, total produksi padi juga mengalami penurunan yang cukup drastis, dari 305.792,00 Ton di awal periode menjadi sekitar 186.929,00 Ton pada tahun 2025. Meskipun luas lahan dan produksi terus menurun, tingkat produktivitas lahan cenderung fluktuatif dengan angka rata-rata 4,89 Ton/Ha. Capaian produktivitas tertinggi berada pada tahun 2016 (5,46 Ton/Ha), sedangkan titik terendah terjadi pada tahun 2020 (4,41 Ton/Ha). Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa alih fungsi lahan menjadi ancaman nyata bagi kapasitas produksi pangan di Kabupaten Maros selama satu dekade terakhir.

Keseluruhan data menunjukkan Kabupaten Maros menghadapi tantangan nyata dalam menjaga ketersediaan beras daerah. Penurunan luas lahan sawah sebagai akibat alih fungsi berpotensi menurunkan produksi padi secara signifikan meskipun produktivitas per hektare dapat ditingkatkan melalui teknologi dan intensifikasi. Kondisi tersebut menjadi dasar penting untuk penelitian mengenai **“Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah terhadap Ketersediaan Pangan Beras di Kabupaten Maros.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa permasalahan yang terjadi masih memerlukan kajian yakni :

1. Bagaimana dampak alih fungsi lahan terhadap produksi padi di Kabupaten Maros?
2. Bagaimana status ketersediaan beras (surplus atau defisit) di Kabupaten Maros?
3. Bagaimana perbedaan ketersediaan pangan beras sebelum dan sesudah alih fungsi lahan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah di atas, dapat diketahui bahwa permasalahan alih fungsi lahan pertanian masih memerlukan kajian yakni :

1. Menganalisis dampak alih fungsi lahan sawah terhadap produksi padi di Kabupaten Maros.
2. Menentukan status ketersediaan beras (surplus atau defisit) di Kabupaten Maros.
3. Membandingkan stok pangan beras sebelum dan sesudah alih fungsi lahan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat, adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. **Bagi Pemerintah**, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait pengendalian alih fungsi lahan pertanian serta upaya peningkatan ketersediaan beras di daerah.
2. **Bagi Peneliti atau Akademisi**, penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi tambahan dalam kajian yang berkaitan dengan dampak alih fungsi lahan terhadap sektor pertanian dan ketersediaan pangan beras .
3. **Bagi Masyarakat**, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan mempertahankan lahan pertanian sebagai penopang utama ketersediaan bahan pangan, khususnya beras .